

Kegiatan Strategi Literasi Smart City Dimensi Smart Society



<https://kalsel.prokal.co/read/news/28731-dari-festival-kuda-lumping-di-kiram-park-mata-rantai-budaya-tak-boleh-putus.html>

Dinas Kominfo Kota Banjarbaru mengadakan kegiatan *Strategi Literasi Smart City Dimensi Smart Society* Melalui “Forum Literasi Banjarbaru Cerdas Kelola Informasi (BARCELONA)”, kegiatan ini sendiri dilaksanakan pada Selasa 15 Oktober 2019 di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru.

Acara ini diikuti oleh beberapa forum masyarakat seperti PKK, *Go Green and Clean* dan lain-lain. Bapak Johan Arifin, AP.MM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga sebagai pembicara dalam kegiatan ini.

(disadur dari: <https://diskominfo.banjarbarukota.go.id/kegiatan-strategi-literasi-smart-city-dimensi-smart-society/>)

Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani beserta Wakil Wali Kota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan membuka secara langsung kegiatan Literasi Smart City Banjarbaru di Auditorium ULM Kota Banjarbaru. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (11/12) ini menghadirkan narasumber sekaligus Founder Oke Oce, H Sandiaga Salahuddin Uno, dengan materi peluang dan tantangan usaha ekonomi kreatif dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Direktur pengendalian informasi, investigasi, dan forensik digital badan siber dan sandi Negara Brigjen TNI Bondan Widiawan, dengan materi keamanan data dan informasi pribadi.

Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh forkopimda Kota Banjarbaru, para mahasiswa/mahasiswi dari perguruan tinggi se Kota Banjarbaru, dan para tamu undangan. Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengucapkan selamat datang kepada H Sandiaga Salahuddin Uno dan Brigjen TNI Bondan Widiawan di Kota Banjarbaru.

Adanya kegiatan ini diharapkan bisa menambah wawasan serta memberi inspirasi dan motivasi baru dalam upaya menyempurnakan terwujudnya proyek masa depan smart city di Kota Banjarbaru. "Adanya kegiatan ini Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh perangkatnya agar mampu memberikan pelayanan berkelanjutan, efektif, efisien, serta dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan kehidupan masyarakat dan mengutamakan kearifan lokal dalam upaya memajukan dan memodernisasikan masyarakat dan daerah," katanya.

H Nadjmi Adhani juga menyampaikan Smart city memang harus didukung, karena itu masa depan, termasuk di dalamnya ada e-government. Melalui kegiatan literasi ini dan peresmian aplikasi idaman, Banjarbaru dalam genggaman, tidak hanya menjadikan banjarbaru yang semakin baik, namun daerah lainnya dapat merasakan manfaatnya.

Pada kegiatan ini ditandai dengan Wali Kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani, Wakil Wali Kota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, didampingi H Sandiaga Salahuddin Uno, Brigjen TNI Bondan Widiawan, serta plt Kadiskominfo Kota Banjarbaru secara resmi meluncurkan aplikasi "IDAMAN BANJARBARU DALAM GENGGAMAN" di depan seluruh tamu undangan. Peluncuran dengan menggunakan Face Detector, dan secara langsung bisa diunduh di Playstore/AppStore yang terdapat dalam gadget atau smartphone seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. Aplikasi ini adalah satu bentuk perwujudan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berfungsi mempermudah pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dari urusan tingkat RT/RW hingga tingkat birokrasi Pemerintahan. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan beberapa Dinas Bidang Pelayanan, seperti DISDUKCAPIL, Polres, Angkasa Pura untuk info penerbangan, PUPR, DPMPTSP, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, LAPOR, PPID, CCTV kota Banjarbaru dan aplikasi siapKK.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/literasi-smart-city-banjarbaru-aplikasi-idaman-banjarbaru-dalam-genggaman-diluncurkan?page=2>.)

Sumber Berita:

1. <https://diskominfo.banjarbarukota.go.id/kegiatan-strategi-literasi-smart-city-dimensi-smart-society/>. 21 Oktober 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/literasi-smart-city-banjarbaru-aplikasi-idaman-banjarbaru-dalam-genggaman-diluncurkan?page=2>. Kamis, 12 Desember 2019 12:04

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.

- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan,

termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- Meningkatnya profesionalisme aparaturnegara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pementapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataankembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari

terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.